

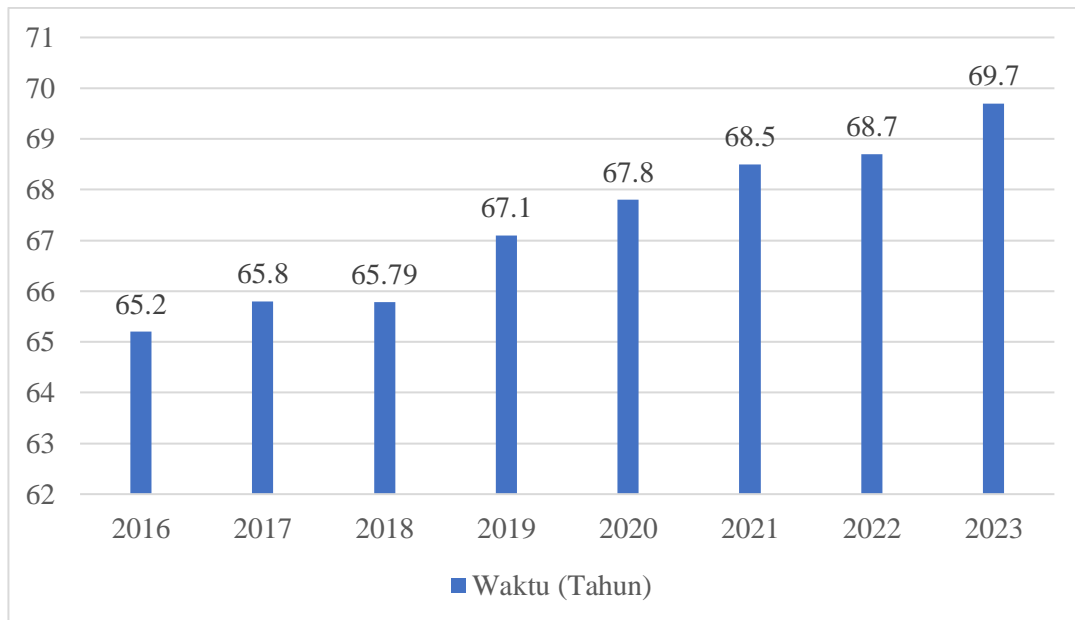
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Menurut Badan Pusat Statistik (per September 2020), Indonesia memiliki jumlah penduduk 270 juta jiwa, menduduki peringkat keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat. Perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah akan berdampak pada kebutuhan masyarakat, seperti konsumsi masyarakat. Permintaan masyarakat yang terus berlanjut ditandai dengan munculnya kemasan produk dari hasil aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai lagi dan kemasan produk tersebut dibuang secara sembarangan yang menimbulkan timbulan sampah. Hasil dari timbulan sampah memiliki dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, seperti lingkungan terlihat kumuh dan kotor, menyebabkan bencana dan sumber penyakit (Damayanti dan Susilih, 2014).

Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan volume sampah meningkat karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan dari hasil kemasan masyarakat. Sampah memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup sosial dan kesehatan manusia. Sampah juga masih dianggap sebagai sisa barang yang hanya merusak lingkungan karena ketidakpahaman masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. padahal, sampah memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan baik.

Gambar 1.1**Laju Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2015 – 2023 (Juta Ton)**

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber website menlhk.go.id

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016 jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia sebesar 65,2 juta ton. Selain itu, timbunan sampah meningkat sebesar 65,8 juta ton tahun 2017 dan mengalami penurunan menjadi 65,79 juta ton pada tahun 2018. Kemudian, tahun 2019 mengalami kenaikan dengan skala besar yang mencapai 67,1 juta ton. Pada saat yang sama, timbunan sampah nasional juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang mencapai 67,8 juta ton. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 68,5 juta ton dan pada tahun 2022 sebesar 68,77 juta ton. sampai tahun 2023 mengalami kenaikan. Sementara itu, pada tahun 2023 mengalami peningkatan timbunan sampah sebesar 69,7 juta ton. Hal tersebut menjadi permasalahan karena timbunan sampah yang semakin meningkat dapat menyebabkan dampak negatif yang tidak diharapkan, antara lain ketidak seimbangan terhadap lingkungan dan

timbulan sampah pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang signifikan karena terjadi tumpukan pada tempat pembuangan akhir (TPA).

Upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan adalah pengelolaan sampah melalui daur ulang dan pembentukan skema bank sampah. Namun rata-rata kapasitas pengelolaan sampah di Indonesia masih di bawah 50%, kecuali kota-kota besar yang rata-rata mencapai 70-80% sebab masih mengikuti dan menggunakan model linear, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan. Padahal, model yang seharusnya diterapkan adalah konsep ekonomi sirkular, yaitu penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang memanfaatkan bahan baku bernilai ekonomi dari sampah. Selain itu, permasalahan lainnya adalah rendahnya daya serap kegiatan daur ulang sampah. Selain itu, 60% produksi dari timbulan sampah berasal dari sampah domestik atau sampah jenis rumah tangga. Di Indonesia pemilahan sampah belum menyeluruh sehingga pemerintah pusat memberikan komitmen dan berperan aktif pada pemerintah daerah untuk mengubah pengelolaan sampah menjadi nilai ekonomi melalui skema bank sampah. (<https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2533/membenahi-tata-kelola-sampah-nasional>).

Masalah sampah merupakan masalah sosial dan kompleks di wilayah Indonesia, termasuk provinsi Jawa Tengah yang relatif padat penduduknya. Kehidupan dan kebutuhan manusia serta segala aktivitasnya bergantung pada limbah karena limbah merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia, seperti aktivitas industri dan pemukiman. Besarnya jumlah sampah yang dihasilkan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk Jawa Tengah mengakibatkan volume

sampah yang terus meningkat yang berdampak pada kapasitas TPA yang tidak mencukupi, banyaknya pembangunan yang mempersempit ukuran TPA, serta teknologi dan infrastruktur yang belum optimal untuk pengelolaan sampah. Berikut merupakan volume sampah yang dihasilkan di Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.1
Volume Sampah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2022

Tahun	Timbulan Sampah (Ton)	Sampah Terangkut	Persentase (%)
2017	5.322.088	1.434.033	26,94%
2018	5.380.989	1.279.069	24%
2019	5.604.080,65	2.774.18920	49,5%
2022	17.490.081,29	10.717.070,11	61,28%

Sumber : Data dan Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 1.1 persentase volume sampah tersebut adalah akumulasi dari timbulan sampah dan sampah yang terangkut dengan jumlah yang berbeda – beda pada setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tabel 1.1 memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya. Di samping itu, terjadi peningkatan dan penurunan oleh sampah yang terangkut dan persentase volume sampah tiap tahunnya sehingga menunjukkan bahwa dari persentase yang dihasilkan tiap tahunnya relatif membaik.

Persentase volume sampah dapat dilihat dari perbandingan sampah yang terangkut dengan jumlah timbulan sampah per hari. Pada tahun 2017, Provinsi Jawa Tengah menghasilkan volume sampah sebesar 5.322.088 juta ton dan sampah yang terangkut sebesar 1.434.033 juta ton dengan persentase 26,94%. Sementara itu,

pada tahun 2018 persentase akumulasi dari timbulan sampah dan yang terangkut mengalami penurunan menjadi 24% dengan jumlah timbulan sampah sebesar 5.380.989 juta ton dan sampah yang terangkut sebesar 1.279.069 juta ton. Sebaliknya, tahun 2019 persentase akumulasi dari timbulan sampah dan yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 49.5% dengan jumlah timbulan sampah 5.604.080,65 juta ton dan sampah yang terangkut sebesar 2.774.189,20 juta ton. Sementara itu, pada tahun 2022 persentase akumulasi dari timbulan sampah dan yang terangkut mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 61,28% dengan jumlah timbulan sampah 17.490.081,29 juta ton dan sampah yang terangkut sebesar 10.717.070,11 juta ton. Sehubungan dengan persentase yang mengalami kenaikan dan penurunan perlu diingat bahwa jumlah timbulan sampah yang terjadi akan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga perlu pencegahan dan upaya untuk mengelola permasalahan sampah yang muncul.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan gaya hidup yang semakin konsumtif, pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari karena akan menimbulkan dampak negatif, seperti sumber penyakit, lingkungan kotor, menyebabkan bencana, dan lain sebagainya. Di samping itu, meningkatnya jumlah sampah dianggap hal biasa oleh masyarakat yang masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna sehingga pengelolaan sampah bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan dan tidak sesuai prosedur. Bersamaan dengan itu, pengelolaan sampah dalam skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari – hari dilakukan dengan cara dibakar dan dalam skala besar dilakukan dengan

membuang di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Di daerah – daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, masalah sampah menjadi isu penting yang dihadapi karena padatnya penduduk, pelayanan persampahan yang belum dilakukan secara menyeluruh, keterbatasan TPS dan TPA, serta minimnya kesadaran perilaku masyarakat yang tidak memilah sampah. Jumlah sampah di Provinsi Jawa Tengah dapat dirinci dari setiap Kabupaten/Kota, yakni memiliki 35 Kabupaten dan Kota yang masing – masing memiliki jumlah timbulan sampah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Timbulan Sampah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019 (Ton)

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah
1	Kota Semarang	466.011
2	Brebes	347.617
3	Cilacap	333.228
4	Kota Surakarta	314.072
5	Banyumas	238.272
6	Magelang	236.135
7	Jepara	228.221
8	Sragen	223.436
9	Semarang	192.316
10	Pati	191.023
11	Pemalang	190.353
12	Kendal	184.300
13	Temanggung	175.242
14	Tegal	167.210
15	Purbalingga	167.127
16	Kudus	159.083
17	Kebumen	148.386
18	Wonogiri	140.236
19	Banjarnegara	134.627
20	Sukoharjo	133.526
21	Pekalongan	130.813

No	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah
22	Blora	130.660
23	Klaten	128.660
24	Wonosobo	115.515
25	Purworejo	108.542
26	Boyolali	97.053
27	Karanganyar	95.760
28	Demak	88.214
29	Rembang	83.861
30	Kota Tegal	78.419
31	Kota Pekalongan	52.822
32	Kota Salatiga	41.283
33	Kota Magelang	31.168
34	Grobogan	29.271
35	Batang	21.600

Sumber : Data dan Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Data dan Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah timbulan sampah terbesar ke 7 dari 35 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang menghasilkan jumlah sebesar 228.221 ribu ton. Rata – rata sampah yang terangkut sebesar 40.551 ribu ton per hari dengan persentase 17,77%. Sehubungan dengan hal itu, Kabupaten Jepara memiliki kepadatan penduduk yang terbilang banyak dengan jumlah sebesar 1.257.912 jiwa dan laju pertumbuhan 1,40% (BPS Kabupaten Jepara, 2019). Oleh karena itu, terjadinya pertumbuhan penduduk tiap tahun memberikan dampak terhadap kenaikan produksi dan timbulan sampah. Selain itu, terjadinya penambahan volume sampah akibat bertambahnya jumlah pabrik di Kabupaten Jepara yang tidak disertai dengan penambahan fasilitas pengelolaan sampah.

Faktor lain yang menjadi pemilihan Kabupaten Jepara sebagai lokus penelitian karena Kabupaten Jepara telah berhasil meraih penghargaan sebagai

Kota Adipura, tetapi dengan predikat tersebut masih mengalami masalah pada pengelolaan sampah. Persoalan dalam pengelolaan dan penanganan sampah menjadi isu lingkungan sehingga perlu gerakan kepedulian terhadap persoalan sampah untuk dapat membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Masyarakat didorong untuk bisa memilah sampah dan mengolah sampah supaya menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Lingkungan Hidup berperan untuk melakukan penanganan terhadap masalah sampah sebagai upaya untuk mengurangi dan mengelola sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara mempunyai tugas menyediakan sistem pengelolaan persampahan dan kebersihan secara terpadu dengan berbasis masyarakat dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka melakukan upaya pengelolaan sampah dibentuk atas dasar Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dan kemudian peraturan tersebut ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah melalui Peraturan Bupati Jepara Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Melalui Jakstrada Pemerintah Kabupaten Jepara merencanakan target untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2025. Upaya pengelolaan sampah yang direncanakan dengan cara pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% dari sampah yang dihasilkan. Dalam hal ini, pengurangan sampah

merupakan pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dari sampah berasal, sedangkan penanganan sampah adalah kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah melalui program – program yang direncanakan, seperti memaksimalkan peran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Optimalisasi peran rumah kompos (DLH Kabupaten Jepara, 2020).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka timbulan sampah. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan angka timbulan sampah di Kabupaten Jepara, salah satunya dengan upaya pengelolaan sampah melalui Program Desa Mandiri Sampah.

Desa Mandiri Sampah merupakan sebuah program yang bertujuan untuk pemberdayaan ke desa agar dapat mengelola sampahnya sendiri di tingkat pedesaan dan sisa (residu) sampah akan diangkut keluar desa untuk bisa diproses di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara itu, desa mandiri sampah juga bekerja sama dengan bank sampah dalam menangani masalah sampah jenis anorganik dan untuk sampah jenis organik dilakukan dengan melakukan pembuatan rumah kompos atau gerakan pembuatan biopori (DLH Kabupaten Jepara).

Program Desa Mandiri Sampah melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, Lembaga Pengelola Sampah dan keterlibatan masyarakat setempat agar mampu mengelola sampah domestiknya, baik itu sampah organik atau anorganik. Di samping itu, tujuan lain untuk meningkatkan pola hidup bersih

dan sehat, meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat setempat melalui pengelolaan sampah menjadi nilai untuk mendukung pencapaian tujuan dalam memerangi timbulan sampah, serta membentuk karakter masyarakat agar peduli terhadap lingkungan.

Pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh desa di Kabupaten Jepara, melainkan masih beberapa desa yang terlibat dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh DLH Kabupaten Jepara. Terdapat 6 (enam) desa yang terlibat dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di antaranya Desa Jugo, Suwawal Timur, Rajekwesi, Mantingan, Sekuro, dan Karimunjawa dari 195 desa atau di kecamatan yang berbeda – beda. Melalui desa mandiri sampah warga desa setempat ikut terlibat dengan cara mengumpulkan sampah sesuai jenisnya untuk diolah sehingga tidak dibuang dan dibakar secara sembarangan dan memberikan hasil timbal balik berupa nilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa dari pengumpulan sampah oleh unit – unit yang dibentuk disetiap desa.

Salah satu desa di Kabupaten Jepara yang melaksanakan Desa Mandiri Sampah adalah Desa Jugo yang terletak di Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Pada Oktober 2019, Desa Jugo merupakan salah satu desa yang telah mendirikan dan membentuk bank sampah sendiri tingkat pedesaan dengan nama “Darling Surip”. Sehubungan dengan itu, pengurus bank sampah Desa Jugo melakukan kegiatan pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan cara penimbangan sampah anorganik, pengelolaan sampah organik dan pengelolaan sampah residu. Dengan demikian, dapat meminimalisir terjadinya dampak negatif terhadap

kerusakan dan keindahan lingkungan serta munculnya masalah kesehatan di Desa Jugo yang sebelumnya banyak warga Desa Jugo yang membuang sampah secara sembarangan di saluran air, seperti ke sungai dan melakukan pembakaran sampah.

Penanganan sampah melalui Program Desa Mandiri Sampah membuat warga desa harus terlibat dalam program tersebut karena sampah berasal dari sumbangan setiap warga desa untuk dikumpulkan dan dilakukan penimbangan. Tingkat jumlah partisipasi masyarakat yang terlibat untuk menjadi nasabah belum mencakup jumlah pencapaian target yang dibutuhkan dalam keterlibatan untuk menjadi nasabah. Pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah adalah mencakup jumlah per Kartu Keluarga (KK) secara keseluruhan. Berikut disajikan tabel partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah melalui Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo.

Tabel 1.3
Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Mandiri Sampah di
Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Warga yang menjadi nasabah	464 KK	76,95%
2	Warga yang tidak menjadi nasabah	139 KK	23,05%
3	Jumlah Kartu Keluarga (KK) Desa Jugo	603 KK	100%

Sumber : Hasil olahan peneliti dalam Daftar Data Bank Sampah Darling Surip Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara Tahun, 2020

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah Kartu Keluarga (KK) Desa Jugo berjumlah 603 per KK, sedangkan warga desa yang berpartisipasi untuk menjadi nasabah dalam program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo sebanyak 464 per KK.

Sisanya yang belum ikut berpartisipasi berjumlah 139 per KK dalam program Desa Mandiri Sampah. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat warga Desa Jugo yang belum berpartisipasi untuk menjadi nasabah apabila dibandingkan dengan warga Desa Jugo yang turut berpartisipasi dalam keberjalanan program Desa Mandiri Sampah sehingga partisipasi masyarakat belum sepenuhnya turut terlibat dalam penjualan sampah di Bank Sampah Desa Jugo.

Sampah organik merupakan sampah rumah tangga yang mudah terurai yang bisa diproses dan dimanfaatkan sebagai pupuk kompos yang bertujuan untuk menghijaukan perkarangan rumah masyarakat desa Jugo, misalnya daun dan sisa makanan. Sementara itu, sampah anorganik merupakan sampah yang bersifat sulit terurai, misalnya botol, plastik dan alat elektronik sehingga sampah tersebut kemudian dikumpulkan di setiap pos yang telah disediakan agar bisa dikelola agar dapat memberikan hasil nilai ekonomi untuk warga Desa Jugo.

Selain itu, ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo yang diperoleh saat wawancara tidak terstruktur pra-penelitian dengan pengurus sampah Desa Jugo. Pertama, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam program Desa Mandiri Sampah, alasan warga desa yang belum menjadi nasabah memiliki karakteristik dan alasan yang berbeda – beda, seperti alasan tidak memiliki sampah, ada alasan yang tidak membutuhkan uang dari penjualan sampah. Padahal tujuan dari adanya program ini untuk membangun dan membentuk kepedulian masyarakat terhadap sampah, meningkatkan ekonomi kerakyatan, dan membangun lingkungan masyarakat agar

tetap sehat. Sementara itu, timbulan sampah di Desa Jugo pada tahun 2020 setiap harinya mencapai 5,83 ton.

Kedua, kurangnya antusias warga desa yang menjadi nasabah menjadi salah satu penyebab adanya penjualan sampah dengan cara jual beli kepada rosok yang sampah anorganik kecuali plastik dengan harga yang murah kurang lebih Rp. 2000/kg dan langsung mendapatkan timbal balik berupa uang. Sementara itu, warga desa yang menjual belikan sampah di bank sampah Desa Jugo mendapatkan harga Rp. 2200 yang lebih mahal, tetapi hasil uang sampah tersebut tidak langsung diberikan tetapi disimpan untuk dijadikan sebagai tabungan. Ketiga, belum terpenuhinya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) untuk pembuangan sampah organik seperti sisa makanan, buah – buahan yang membusuk, dan sampah pekarangan rumah sehingga sampah organik yang berasal dari pekarangan rumah masih diperbolehkan untuk dibakar.

Setiap pelaksanaan program tentunya tidak akan berjalan mulus begitu saja, hal tersebut tidak serta menandakan bahwa program desa mandiri sampah berjalan tanpa adanya beberapa kendala. Hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo yang masih ditemukan beberapa kendala. Oleh karena itu, diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan untuk meminimalisir kendala – kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo agar program dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pemaparan pokok permasalahan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan dalam efektivitas program tersebut bahwa efektivitas

program Desa Mandiri Sampah masih belum berjalan mulus. Efektivitas sebuah program atau kegiatan merupakan suatu hal yang penting untuk mencapai tujuan, melalui program Desa Mandiri Sampah di Kabupaten Jepara diharapkan dapat mampu menjawab persoalan – persoalan sampah yang terjadi di masyarakat dan menciptakan perlindungan terhadap lingkungan. Melihat uraian latar belakang khususnya di Desa Jugo, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut yang mampu menganalisis efektivitas program Desa Mandiri Sampah dan faktor penghambat efektivitas program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?
2. Apa faktor yang menghambat efektivitas program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas program desa mandiri sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.
2. Menganalisis faktor yang menghambat efektivitas program desa mandiri sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca melalui penelitian yang dilakukan sehingga dapat memberikan informasi dan kontribusi

pemikiran khususnya bagi Ilmu Administrasi Publik konsentrasi manajemen publik.

- b. Memberikan pembelajaran dan pemahaman bagi peneliti atau mahasiswa lainnya untuk melakukan penelitian – penelitian, khususnya tentang penanganan sampah dengan upaya pengelolaan sampah melalui efektivitas pelaksanaan program Desa Mandiri sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah serta menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas program Desa Mandiri sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam melakukan pengelolaan sampah dengan tujuan dapat menangani pengurangan sampah masyarakat di Kabupaten Jepara.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh dan masukan kepada masyarakat untuk mengetahui program Desa Mandiri Sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara akan pentingnya pengelolaan sampah.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sesuai dengan tema yang diteliti oleh peneliti lain sebagai referensi untuk perbandingan serta mengetahui lebih jauh kenyataan dan permasalahan yang ada di lapangan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis lakukan sesuai dengan tema penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Anas (2017) dengan judul “Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan *Green and Clean* (LGC) di Kabupaten Lamongan”. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program LGC di Kabupaten Lamongan sudah efektif dengan melihat kriteria: 1) tercapainya tujuan sesuai Instruksi Bupati yang diikuti oleh 350 desa dari 472 desa atau sudah 80% turut dalam program LGC, (2) sarana prasarana dari DLH untuk program LGC memenuhi standar, (3) melakukan evaluasi program LGC dalam waktu 1 sampai 3 bulan oleh DLH Kabupaten Lamongan.

Penelitian kedua oleh Wismayanti dan Purnamaningsih (2020) dengan judul “Efektivitas Program Badung Anti Kantong Plastik “Batik” Berbasis Kearifan Lokal dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik (Studi Kasus Desa Adat Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung).” Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program Badung Anti Kantong Plastik “Batik” belum efektif karena pencapaian tujuan

program kurang baik dan hanya berpegangan pada SOP belum didukung dengan peraturan, jangka waktu yang ditetapkan belum sepenuhnya berjalan oleh Dinas dan Pemerintah Desa, serta SDM, teknologi, sarana prasarana, dan anggaran belum memadai sehingga pelaksanaan program masih kurang efektif.

Penelitian ketiga oleh Putra (2017) dengan judul “Efektivitas Program Pengelolaan Sampah TPS3R Berbasis Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sleman (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2015 – 2017).” Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam menerapkan Program pengelolaan sampah TPS3R berbasis kelompok masyarakat belum berjalan efektif dan tidak sesuai target yang ditetapkan sebelumnya.

Penelitian keempat oleh Putri, dkk (2018) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Ayo Nabung Sampah dalam Menjaga dan Memelihara Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Maesa Kota Bitung.” Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa pelaksanaan program Ayo Nabung Sampah berjalan cukup efektif dengan ditandai oleh: (1) berkurangnya sampah di Kecamatan Maesa, tersedianya sarana prasarana pengangkut sampah, buku tabungan sampah, tempat penampungan sampah, dan timbangan sampah, (3) perencanaan dan pembagian program kerja sesuai dengan SOP yang tertuang dalam SK Camat.

Penelitian kelima oleh Hidayah, dkk (2020) dengan judul “Efektivitas Program *Zero Waste City* di Kota Surabaya.” Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan hasil penelitian bahwa ketetapan sasaran program dengan melalui Pemerintah Kota Surabaya telah berperan aktif untuk menyadarkan masyarakat, sosialisasi program dilaksanakan secara berturut – turut melalui pertemuan langsung dan media sosial, tujuan program, berdasarkan Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019 perubahan atas Perda Kota Surabaya No. 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya serta mengadakan sanksi kepada pembuang sampah secara sembarangan, serta pemantauan program, pelaksanaan cukup efektif dengan berdampak pada kurangnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas).

Penelitian keenam oleh Pujowati, dkk (2019) dengan judul “*The Effectiveness of The Performance of Community Based 3R Waste Management Policy in Kediri City.*” Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan hasil bahwa kinerja kebijakan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat belum berjalan efektif karena peran masyarakat dalam keberjalanan pengelolaan sampah masih pasif, kebijakan yang tidak diimplementasikan secara optimal, meningkatnya jumlah kapasitas sampah yang berasal dari rumah tangga, limbah pasar, pertokoan, rumah sakit, dan bangunan yang dibuang ke TPA.

Penelitian ketujuh oleh Suryatmaja, dkk (2018) dengan judul “*Effectiveness of Integrated Waste Management Through The Household Waste Program (Case Study: Wanasari Village Tabanan Regency).*” Metode yang digunakan adalah Partisipatif Riset Aprasial (PRA) dengan hasil bahwa efektivitas melihat dari sisi

manajerial, sumber daya manusia (SDM), dan sarana prasarana dengan hasil pengelolaan sampah sudah efektif ditunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam memnetukan kebijakan kepada masyarakat untuk melaksanakan pemilahan sampah.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu yang dirangkum dalam penelitian ini adalah untuk menghindari kesamaan yang dilakukan terhadap peneliti lain yang telah melaksanakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan program. Melalui penelitian terdahulu, persamaan dari penelitian ini berupa tentang efektivitas pengelolaan sampah melalui kegiatan atau program sebagai bentuk penanganan sampah. Sementara itu, perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yakni lokus penelitian yang berbeda dan fokus proses dalam melakukan pelaksanaan kegiatan atau program pengelolaan sampah. Peneliti mengangkat dari beberapa peneliti lain sebagai pendukung dan referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian penulis.

1.5.2 Administrasi Publik

1.5.2.1 Pengertian Administrasi Publik

Menurut Owen Hughes (dalam Keban 2014:8) menyatakan bahwa administrasi publik dipandang sebagai studi akademik tentang sektor publik untuk manajemen pengembangan teknologi modern menuju pada *modern governance*. Pendapat lain C. T. Goodsell (dalam Keban 2014:8) mendefinisikan administrasi publik sebagai upaya untuk menghasilkan *integrated public governance* yang melibatkan semua pihak dalam pemberian pelayanan publik yang diintegrasikan

berdasarkan nilai legalitas, efisiensi, efektivitas, keadilan, keterandalan, transparansi, keterlibatan dan integritas untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan dapat mencapai kehidupan masyarakat yang demokratis.

Adapun administrasi publik memiliki ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur – unsur administrasi publik yang dikemukakan oleh Nicholas Henry (1995) (dalam Keban, 2014: 8), yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi publik, yaitu prinsipnya berkenaan dengan model – model organisasi dan perilaku birokrasi.
- b. Manajemen publik, yaitu berkaitan dengan sistem ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumberdaya manusia.
- c. Implementasi, yaitu berkaitan dengan menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika birokrasi.

Berdasarkan berbagai pengertian administrasi publik menurut beberapa ahli maka penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses dan usaha kerja sama yang melibatkan organisasi publik yang berkaitan dengan manajemen publik, implementasi kebijakan publik, etika dan perilaku birokrasi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan memberikan pelayanan dan kebutuhan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah dituntut untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, salah satunya adalah permasalahan tentang manajemen pengelolaan sampah. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas program dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah di wilayah desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan disiplin ilmu pada administrasi publik mengalami perubahan dan juga mengalami pergantian cara pandang yang berbeda antara paradigma yang lama dengan yang baru. Menurut Kuhn (dalam Keban, 2014 : 31) menyatakan paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai – nilai, metode – metode, prinsip dasar atau suatu cara untuk memecahkan suatu masalah – masalah yang sedang diikuti oleh masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Nicholas Henry (dalam Keban, 2014) mengungkapkan paradigma dalam administrasi publik, yaitu sebagai berikut :

1. Paradigma 1 (1990 – 1926) : Dikotomi Politik dan Administrasi

Paradigma ini menyatakan bahwa pemisahan antara fungsi politik dan fungsi administrasi dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut. Badan yudikatif berfungsi membantu badan legislatif dalam menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Lokus dalam paradigma ini adalah *government bureaucracy*, sedangkan untuk fokus dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

2. Paradigma 2 (1927 – 1937) : Prinsip – Prinsip Administrasi

Dalam paradigma ini memperkenalkan prinsip – prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik, yaitu POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang dapat diterapkan secara universal. Lokus dalam paradigma ini tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan prinsip – prinsip administrasi dapat berlaku secara universal termasuk di dalam organisasi pemerintah.

3. Paradigma 3 (1950 – 1970) : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik

Dalam paradigma ini mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis, ketidak konsistenan prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip – prinsip tersebut tidak berlaku secara universal. Dalam konteks paradigma ini bukan dapat berlaku di mana saja, tetapi selalu dipengaruhi nilai – nilai tertentu. Paradigma ini menganggap bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik dan terjadi pertentangan antara anggapan mengenai *value-free administration* di satu pihak dengan anggapan akan *value-laden politics* di lain pihak. Lokus dalam paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip – prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan.

4. Paradigma 4 (1956 – 1970) : Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi

Dalam paradigma ini perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya, merupakan fokus dari paradigma ini, dengan perkembangan yang terjadi, yaitu yang berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni

yang didukung oleh psikologi sosial dan yang berorientasi pada kebijakan publik. Semua fokus dikembangkan dan diasumsikan tidak hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam dunia administrasi publik sehingga lokus menjadi tidak jelas.

5. Paradigma 5 (1970 – sekarang) : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik

Dalam paradigma ini memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, kebijakan publik (*public policy*), sedangkan lokus dari administrasi publik dalam paradigma ini adalah pada birokrasi pemerintahan dan masalah – masalah dan kepentingan – kepentingan publik (*public affairs*).

6. Pradigma 6 (1990 – sekarang) : *Governance*

Governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan di mana urusan – urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola dengan melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma *Governance* ini mengutamakan pada mekanisme dan proses di mana para masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingan dan memediasi berbagai perbedaan – perbedaan dan menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta memainkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sementara masyarakat madani (*civil society*) menyelenggarakan interaksi sosial dan politik yang sehat.

Paradigma terakhir ini untuk memperkuat interaksi antara tiga sektor tersebut untuk mempromosikan *people-centered development*.

Berdasarkan uraian paradigma administrasi publik, penelitian ini termasuk dalam paradigma kelima, yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik (1970 – sekarang), paradigma tersebut sudah menjelaskan mengenai fokus dan lokus yang jelas. Ditunjukkan bahwa fokus dari paradigma ini terbagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam administrasi publik terdiri dari 2 (dua) konsentrasi yang berbeda antara manajemen publik dan kebijakan publik, sedangkan lokus dari administrasi publik adalah organisasi publik, seperti birokrasi pemerintahan. Bahasan di dalam konsentrasi manajemen publik salah satunya terdapat prinsip – prinsip manajemen, yaitu efektivitas. Efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai program yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya oleh suatu organisasi publik. Dalam hal itu, manajemen publik menekankan nilai – nilai dalam manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Sehubungan dengan itu, penelitian ini melihat administrasi publik dari segi konsentrasi manajemen publik dengan melalui efektivitas program yang dilaksanakan oleh organisasi publik, yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

1.5.3 Manajemen Publik

1.5.3.1 Pengertian Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan salah satu cabang dari Ilmu Administrasi Publik dan berkaitan dengan organisasi. Setiap organisasi dibutuhkan adanya sebuah

manajemen, karena tanpa adanya manajemen suatu organisasi tidak berjalan maksimal dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Terdapat tiga alasan organisasi diperlukannya sebuah manajemen (Handoko, 2015 : 6 – 7), yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan

Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dan individu.

2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan – tujuan yang saling bertentangan

Di dalam manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan – tujuan, sasaran dan kegiatan – kegiatan yang saling bertentangan dari pihak – pihak yang berkepentingan di dalam organisasi.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas

Suatu kerja dalam sebuah organisasi dapat diukur dan dengan banyak cara yang berbeda – beda, yaitu salah satunya cara yang umum adalah efisiensi dan efektivitas.

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban 2014: 92) memberikan arti manajemen merupakan hal yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi dan proses menjalankan organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi. Overman (dalam Keban, 2014 : 92) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah *scientific analysis* dan bukan *policy analysis*, bukan juga administrasi publik baru tetapi manajemen publik merupakan suatu indisipliner dari aspek – aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen, seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling*, dengan sumberdaya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik

Berdasarkan uraian pengertian manajemen publik menurut para ahli, penulis menyimpulkan bahwa manajemen publik adalah suatu aspek yang berkaitan dengan suatu organisasi publik yang dilaksanakan oleh kelompok – kelompok kepentingan publik dengan memerlukan analisis dari prinsip – prinsip manajemen, yaitu *planning, organizing, controlling* untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan direncanakan. Pada penelitian ini, manajemen publik digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas program desa mandiri sampah untuk mengelola sampah di wilayah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DLH Kabupaten Jepara dalam mengatasi permasalahan publik terkait lingkungan hidup, salah satunya permasalahan sampah di Kabupaten Jepara.

1.5.3.2 Prinsip – Prinsip Manajemen Publik

Menurut Muninjaya (dalam Rusdiana & Ghazin, 2014: 80 – 81) terdapat 3 prinsip – prinsip pokok di dalam manajemen, yaitu sebagai berikut :

1. Efisiensi

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mencapai akhir dalam melakukan pekerjaan dengan benar yang ditimbulkan dalam melakukan aktivitas sebagai bentuk upaya untuk melihat usaha dan pengorbanan yang dikeluarkan. Efisiensi dapat berkaitan dengan besarnya *input* untuk menghasilkan *output*.

2. Efektivitas

Efektivitas merupakan seberapa besar tujuan yang sedang atau telah tercapai yang direncanakan dan ditetapkan karena adanya suatu proses program atau kegiatan.

3. Rasional dalam Mengambil Keputusan

Pengambilan keputusan diperlukan pemikiran yang rasional dalam proses manajemen, di dalam manajemen pengambilan keputusan merupakan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan tentang perkembangan dari suatu kegiatan.

1.5.3.3 Fungsi - Fungsi Manajemen Publik

Menurut Handoko (2015:10) manajemen digunakan untuk menentukan, menginterpretasikan, mencapai tujuan – tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen publik. Menurut George R. Terry (dalam Handoko, 2015:22) manajemen memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*), merupakan proses awal dengan membutuhkan rencana – rencana yang dibutuhkan untuk penentuan alternatif keputusan agar sesuai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengorganisasian (*organizing*), merupakan proses penentuan sumber daya dan kegiatan – kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perancangan dan pengembangan suatu organisasi akan dapat membawa hal – hal yang telah ditetapkan ke arah tujuan.
3. Pengarahan (*actuating*), merupakan pimpinan melakukan tahap pengarahan kepada bawahan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang efisien dan efektif sehingga dapat terjalin kerja sama antara satu anggota dengan anggota yang lainnya.
4. Pengendalian (*controlling*), merupakan tahap evaluasi dari rencana yang telah dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dilakukan adanya pengukuran pelaksanaan kegiatan dan membandingkannya dengan standar

yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam tahap ini bisa juga terjadi pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan ketika pelaksanaan kegiatan terdapat yang menyimpang.

1.5.4 Efektivitas

1.5.4.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan kata kerja dari efektif dan berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *effective* yang memiliki arti suatu keberhasilan yang dilakukan dengan baik. Menurut Mahmudi (2015: 86) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan maka akan semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Ekosusilo dan Kasihadi (dalam Wijaya & Rifa'i, 2016: 177 – 178) menyatakan bahwa dalam efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauhmana apa yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, semakin banyak rencana yang direncanakan maka akan semakin efektif pada suatu kegiatan atau program tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian definisi efektivitas menurut beberapa ahli, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dalam pencapaian suatu target sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kaitannya dengan penelitian ini, efektivitas digunakan untuk melihat pencapaian tujuan seberapa jauh pencapaian tujuan dari program Desa Mandiri Sampah oleh DLH Kabupaten Jepara untuk mengelola sampah dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

1.5.5 Efektivitas Program

1.5.5.1 Pengertian Efektivitas Program

Siagian (dalam Mutiarin dan Zainudin, 2014: 5) bahwa program merupakan bentuk dari rencana yang akan dilakukan yang memiliki hubungan untuk pembangunan nasional dengan melaksanakan program kerja sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan. Hubungannya dengan efektivitas program merupakan tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran rencana awal yang menunjukkan sejauh mana program tersebut dilaksanakan.

Mutiarin dan Zainudin (2014: 15) berpendapat bahwa efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan dalam sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program atau kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas program perlu dilakukan untuk bisa menemukan informasi sejauh mana manfaat dan dampak dari pelaksanaan program yang ditimbulkan terhadap penerima program.

Berdasarkan berbagai definisi menurut para ahli, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas program adalah suatu perwujudan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan program tepat sasaran dan sesuai tujuan yang ditetapkan sebelumnya dengan hasil kenyataan yang telah dicapai. Kaitannya dengan penelitian ini, efektivitas program digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan dari DLH Kabupaten Jepara dalam program Desa Mandiri Sampah untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan mengelola sampah di wilayah desa.

1.5.5.2 Indikator Efektivitas Program

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Anas, 2017) menyatakan mengenai kriteria efektivitas program, antara lain :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Kejelasan tujuan berfungsi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang terarah pada sebuah kegiatan atau program yang ditetapkan sehingga organisasi dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran dan program tersebut dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Kejelasan strategi pencapaian tujuan diartikan bahwa strategi adalah keputusan dan tindakan yang dibuat dan diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran – sasaran yang ditetapkan agar pelaksana kegiatan program tidak mengalami kesalahan dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap

Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap dimaksudkan agar strategi yang ditetapkan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan dilakukan untuk menjabarkan dan menjembatani tujuan – tujuan dengan usaha – usaha pelaksanaan kegiatan atau program operasional.

4. Perencanaan yang matang

Perencanaan yang matang diartikan sebagai untuk memutuskan dan merencanakan kegiatan program yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang oleh organisasi terkait sehingga perencanaan kebijakan yang dilakukan dan ditetapkan sudah secara matang untuk dilakukan.

5. Penyusunan program yang tepat

Pelaksanaan kegiatan program diperlukan adanya penyusunan program yang tepat. Program merupakan penjabaran dari rangkaian – rangkaian kegiatan atau program yang akan dilakukan oleh organisasi, hal ini diperlukan agar rencana dalam pelaksanaan kegiatan program dapat tepat sasaran dan pelaksana kegiatan tidak kurang dalam memiliki pedomaan saat bertindak.

6. Tersedianya sarana prasarana kerja

Tersedianya sarana prasarana merupakan aspek penting dalam pencapaian tujuan kegiatan atau program. Sarana prasarana diperlukan untuk dapat melaksanakan proses keberjalanan bekerja secara produktif terhadap kegiatan program yang dilaksanakan oleh organisasi terkait.

7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut dalam melaksanakan suatu kegiatan tidak akan mencapai sasarannya. Pelaksanaan kegiatan atau program yang baik dan tepat akan memberikan dan perhatian *feed back* untuk suatu organisasi.

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan suatu program dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program sehingga diperlukan *monitoring* dan evaluasi. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan agar dalam pelaksanaan kegiatan atau program tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan. Selain itu, *monitoring*

dilakukan agar pelaksanaan suatu program dapat berjalan sesuai dengan tujuan program.

Budiani (dalam Hidayah, Kusbandrijo & Murti, 2020) berpendapat lain bahwa indikator untuk efektivitas suatu program, yakni :

1. Ketepatan sasaran program

Untuk menunjukkan sejauh mana program yang tepat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, apabila menganalisis mengenai ketepatan sasaran program terdapat dua indikator, antara lain yang ditujukan untuk pemerintah dan masyarakat.

2. Sosialisasi program

Merupakan kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga dapat memberikan suatu informasi mengenai pelaksanaan program yang dilaksanakan agar dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada sasaran peserta program. Memberikan informasi melalui informasi sebagai tahap awal yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan kelancaran untuk melanjutkan suatu kegiatan karena dengan memberikan informasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi yang menerima informasi.

3. Tujuan program

Untuk membuktikan sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan program

Sebagai tindakan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan suatu program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku maka perlu dilakukan koreksi untuk memperbaikinya.

1.5.5.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program

Menurut Suharto (dalam Najidah, 2019) menjelaskan beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas program yang terbagi dalam 4 (empat) kriteria, yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran, maksud dari sasaran ini adalah sejauh mana pelanggan dari kegiatan program tersebut dapat tepat sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya.
2. Koordinasi, dimaksudkan untuk melihat bagaimana koordinasi yang terjalin antar organisasi lembaga sebagai agen pelaksana kegiatan atau program.
3. Sosialisasi, dibutuhkan untuk memberikan kelancaran pada kegiatan program yang dilaksanakan, apakah sosialisasi yang disampaikan sampai kepada masyarakat atau menyimpang tidak sesuai dengan situasi kondisi dan jadwal kegiatan program yang telah direncanakan.
4. Jumlah Bantuan, untuk pelaksanaan kegiatan program yang diberikan harus sesuai dengan yang dianggarkan dan aturan yang berlaku, apabila jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai maka bantuan yang diberikan tidak tepat.

Pendapat lain oleh Lestanata dan Ulung (dalam Chrisanty, 2020) faktor yang mempengaruhi efektivitas, yakni:

1. Peranan Pendamping

Peranan pendamping tentang dengan pengembangan kelompok sasaran, yaitu membantu kelompok sasaran untuk memperkuat dinamika *intern* dengan memantapkan aspek keorganisasian, membantu untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan terdekat yang dapat dikelola sebagai usaha produktif dan sebagai penghubung antara kelompok sasaran dengan berbagai potensi dari berbagai potensi yang termanfaatkan dari luar.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting bagi dalam penyelenggaraan suatu kegiatan karena dalam pelaksanaan kegiatan dari organisasi memiliki keterbatasan untuk melakukan kegiatan pembangunan.

3. Kemampuan Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran merupakan pihak yang menikmati hasil suatu kegiatan dan harus ditentukan secara jelas untuk dapat memobilisasi sumber – sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

4. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya meliputi aspek keterlibatan para pemangku kepentingan kegiatan untuk membantu tercapaian tujuan dan sasaran.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang kurang memadai dan komitmen yang rendah dari pelaksana suatu kegiatan.

Efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan program apakah berjalan secara efektif atau tidak efektif dalam keberjalanannya terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Mutiarin dan Zaenudin, 2014 : 98 – 99) menyebutkan bahwa terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi dampak dan efektivitas dari pelaksanaan suatu program, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kondisi Lingkungan

Dimensi lingkungan berasal dari kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, geografis (kondisi alam), dan kondisi hukum.

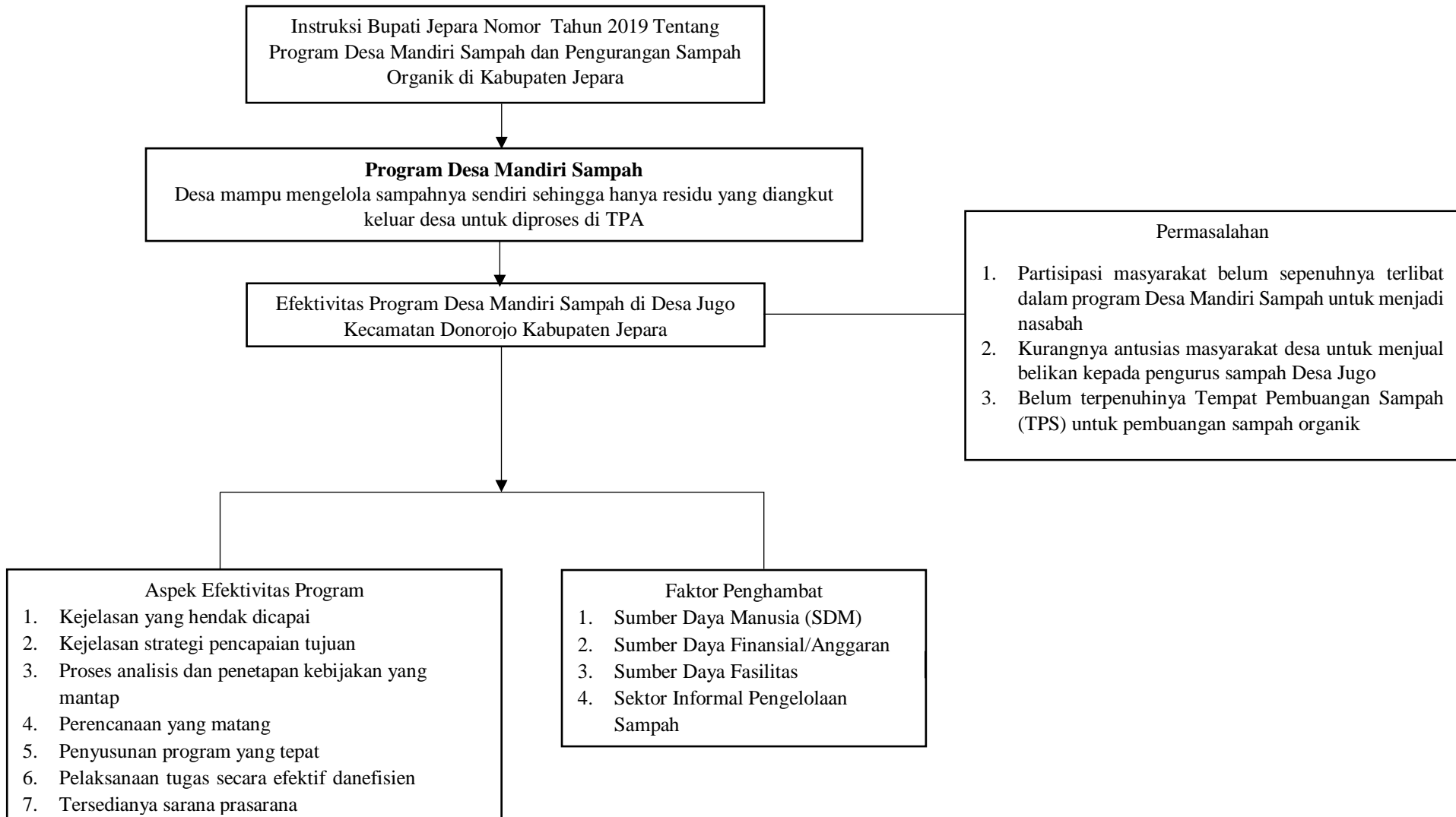
2. Sumber Daya

Sumber daya digunakan untuk mendukung implementasi pelaksanaan kegiatan atau program pelayanan masyarakat dan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan kegiatan program. Dimensi sumberdaya dapat berasal dari sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan sumberdaya sarana prsarana.

3. Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam proses dan dukungan pelaksanaan kegiatan program dengan memiliki kemampuan, kompetensi dan pemahaman di bidang yang sesuai dengan kegiatan program untuk menjadikan penentu dalam tercapainya tujuan.

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Fenomena Penelitian

Eektivitas merupakan unsur untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif apabila sasaran maupun target diperhatikan dalam suatu kegiatan. Organisasi memiliki tujuan yang telah disusun terlebih dahulu untuk menjadi acuan suatu kegiatan melalui pra, proses, dan pasca kegiatan. Oleh karena itu, tentunya menerapkan fungsi – fungsi manajemen, yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), pengendalian (*controlling*). Penerapan fungsi – fungsi manajemen memiliki peran masing – masing untuk melengkapi satu sama lain dan mempermudah organisasi dalam menentukan tujuan, sasaran dan capaian target. Tahap pengendalian atau pengawasan akan menjadikan salah satu sudut pandang dalam melihat efektif atau tidak suatu kegiatan yang dilaksanakan. Aspek – aspek yang akan menjadi fenomena penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara
 - 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, mengetahui secara detail tujuan dari program desa mandiri sampah, apakah tujuan tersebut relevan untuk dapat dilaksanakan untuk tercapainya tujuan.
 - 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, bentuk strategi pencapaian tujuan program desa mandiri sampah. Upaya agar pencapaian tujuan sesuai sehingga pelaksanaan suatu program tidak hilang arah.
 - 3) Proses analisis dan penetapan kebijakan yang mantap, mengetahui bagaimana proses analisis perumusan kebijakan sesuai dengan tujuan dan

strategi atau tidak dengan tujuan operasional suatu kegiatan karena dengan kebijakan yang terbentuk dapat menjembatani suatu kegiatan.

- 4) Perencanaan yang matang, perencanaan sebagai yang mendasari dan apa yang harus dikerjakan baik untuk kegiatan saat ini dan untuk kegiatan masa yang akan datang.
- 5) Penyusunan program yang tepat, rencana harus dijabarkan sesuai dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Ketepatan dalam suatu kegiatan atau program penting karena apabila tidak tepat dalam pekerja akan memberikan pedoman yang kurang dalam bertindak.
- 6) Pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, sejauh mana kegiatan operasional program dalam memberikan perubahan apabila suatu kegiatan tepat maka akan memberikan *feedback* untuk pelaksana kegiatan.
- 7) Tersedianya sarana prasarana, pelaksanaan suatu program dapat berjalan produktif dan efektif jika didukung dengan sarana prasarana yang memadai.
- 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan suatu kegiatan perlu melakukan pengawasan untuk dapat memperbaiki apabila terdapat kesalahan yang dianggap tidak sesuai dan mempertahankan kegiatan yang dianggap baik.

melihat pihak mana saja yang bertugas dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian program desa mandiri sampah, serta apa saja bentuk dari sistem fungsi pengawasan dan pengendalian program desa mandiri sampah.

2. Faktor yang menghambat efektivitas Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara

Pada fenomena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor penghambat dari program desa mandiri sampah di Desa Jugo. Faktor penghambat tersebut akan didapatkan dan dikaji berdasarkan hasil temuan melalui wawancara yang akan dilakukan peneliti di lapangan.

1.8 Argumen Penelitian

Masalah sampah merupakan masalah sosial dan kompleks di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meminimalisir timbulan sampah melalui pengelolaan sampah yang bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya dengan melibatkan masyarakat Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara mengupayakan untuk meminimalisir timbulan sampah melalui Program Desa Mandiri Sampah. Desa mandiri sampah ditujukan untuk desa agar mampu mengelola sampahnya sendiri di wilayah desa masing – masing, salah satunya, yaitu Desa Jugo. Dalam pelaksanaannya, Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo belum berjalan secara optimal hal tersebut dapat dilihat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam program, warga desa yang menjual sampah melalui pengepul rosok, pembakaran sampah organik karena belum terpenuhinya Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Program desa mandiri sampah merupakan gabungan bank sampah anorganik dan kampung organik di setiap sehingga terjadi pembentukan desa mandiri sampah.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Moloeng (2012:6) mengemukakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan secara ilmiah, apa adanya dan tidak dimanipulasi dan penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yakni melakukan reinterpretasi tentang keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti. Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2016:9) metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti adalah sebagai interumen kunci, teknik pengumpulan data kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Desain penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi di lapangan dan menghubungkan sebab akibat masalah tersebut untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas program desa mandiri sampah di Desa Jugo.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau lokasi di mana penelitian ini menangkap objek yang diteliti. Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Jugo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi secara jelas dan aktual sesuai dengan masalah yang diteliti untuk mengumpulkan data – data melalui wawancara. Subjek yang diambil dalam penelitian ini sebagai informan, yaitu pengurus Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo yang terdiri dari Kepala Desa Jugo, Direktur Sampah Desa Jugo, kader – kader sampah Desa Jugo dan masyarakat yang menjadi nasabah dan turut berpartisipasi dalam desa mandiri sampah.

1.9.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan berupa kata – kata tertulis, teks gambar dan bukan angka – angka.

1.9.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dan diambil langsung melalui sumbernya. Perolehan data primer dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada informan terkait pelaksanaan desa mandiri sampah di Desa Jugo, antara lain pengurus desa mandiri sampah di Desa Jugo yang terdiri dari penanggung jawab Bank

Sampah Desa Jugo, direktur Bank Sampah Desa Jugo, anggota Bank Sampah Desa Jugo, serta warga Desa Jugo.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui penelitian terdahulu, dokumen – dokumen, *website*, berita yang berkaitan dengan efektivitas program desa mandiri sampah.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi secara langsung dari pihak terkait dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan melalui panduan wawancara (*interview guide*) kepada informan. Melalui teknik wawancara peneliti ingin menggali untuk mendapatkan informasi secara lebih dalam dari informan mengenai mengapa program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo belum efektif serta faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut. Peneliti memilih informan sesuai dengan ketentuan yang dapat dipercaya, jujur dan orang yang mengerti tentang program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo.

2. Observasi atau Pengamatan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung berkenaan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam, atau objek yang diteliti (Sugiyono, 2016 : 145). Peneliti akan melakukan

observasi atau pengamatan di Desa Jugo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara sebagai tempat program desa mandiri sampah dilaksanakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang diperoleh dengan cara mendokumentasikan keadaan pada saat observasi atau pengamatan. Peneliti akan mendokumentasikan keadaan saat observasi di tempat yang telah ditentukan, yaitu di Desa Jugo sebagai tempat program desa mandiri sampah dilakukan.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang digunakan oleh peneliti, seperti jurnal artikel, berita, *website* yang berhubungan dengan efektivitas program desa mandiri sampah dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengurangan sampah.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain karena untuk memahami mengapa Program Desa Mandiri Sampah di Desa Jugo belum efektif membutuhkan berbagai domain atau kategori yang terlibat dalam keberjalanan program desa mandiri sampah tersebut. Teknik analisis domain merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis gambaran – gambaran tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian secara umum dan menyeluruh atau di tingkat permukaan, tetapi sudah menemukan berbagai domain – domain atau kategori dari objek penelitian yang diteliti. Adanya variasi pada domain, Spradley (dalam Bungin, 2017: 212) memberikan hubungan semantik yang bersifat universal yang dapat digunakan untuk jenis situasi sosial yang meliputi

jenis, ruang, sebab akibat, rasional, lokasi kegiatan, cara ke tujuan, fungsi, urutan, dan atribut.

Setelah melakukan pengumpulan data, seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah oleh peneliti dan data dianalisis. Adapun model analisis data yang berlangsung secara terus menerus adalah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan hal – hal yang pokok, merangkum, memfokuskan pada hal – hal yang penting untuk ditemukan tema dan polanya. Data yang telah direduksi ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antar teori. Data disajikan dalam bentuk narasi disertai dengan uraian – uraian penjabaran yang bersifat deskriptif.

3. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap dengan temuan data – data yang berupa deskripsi atau gambaran umum suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas dan menjadi permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian dapat ditarik kesimpulan yang kredibel.

1.9.8 Kualitas Data

Teknik pemeriksaan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Menurut Sugiyono (2016: 273) terdapat tiga macam teknik triangulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi yang digunakan untuk menguji data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi yang digunakan untuk menguji dengan cara mengecek data yang sama tetapi dengan menggunakan alat yang berbeda, seperti wawancara yang kemudian dicek dengan observasi, dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu Pengumpulan Data

Triangulasi waktu diartikan sebagai triangulasi yang sering mempengaruhi data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada waktu pagi, siang, atau malam akan memberikan data yang lebih valid.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber teknik yang dilakukan dengan cara pengecekan data melalui beberapa sumber, sedangkan Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengecekan data yang sama dengan alat yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.